

Analisis Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia

Uci Febriani* Junita Putri Rajana Harahap, SE, M.Si, AK

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Medan, Indonesia.

ABSTRACT

The aims this research is to examine and analyze the determinants of the level that affect the government. The sample in this study is the financial statements of local governments in Indonesia in 2017-2019. The sampling method used in this research is purposive sampling method, and the analysis model used is multiple regression analysis. The results of this show that regional wealth has an effect on the size of the provincial government's financial statements, while the number of OPD, local governments and the number of audit findings have no effect on the level of government financial statements. The average level of financial reporting in Indonesia in the 2017-2019 period was 58.35%, with the lowest level being North Kalimantan Province in the 2017 period at 43% and the highest government level being East Java Province in the 2017 period at 69%.

ARTICLE HISTORY

Submitted 25 Oktober 2021
Revised 2 November 2021
Accepted 7 November 2021

KEYWORDS

Tingkat Pengungkapan; Kekayaan Daerah; Pemerintah Provinsi; Akuntansi Pemerintahan; Organisasi Perangkat Daerah.

CITATION (APA 6th Edition)

Febriani, Uci & Harahap, Junita.P.R . (2021). Analisis Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Regres*.1(1), 9-17

*CORRESPONDANCE AUTHOR

ucifebriani99@gmail.com
ririeharahap87@gmail.com

PENDAHULUAN

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Indonesia mulai memasuki era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di mana setiap urusan pemerintah sebagian dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kebijakan otonomi daerah ini diambil supaya pemerintah daerah bisa mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumberdaya yang dimilikinya dan dapat melaksanakan tatakelola pemerintahan dengan baik. Untuk meningkatkan hal tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

"Laporan keuangan merupakan suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan" (Mardiasmo, 2009). Laporan keuangan dapat merupakan sebuah mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disajikan secara jelas dan terhindar dari kesalahpahaman bagi para pembaca laporan. Laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan SAP kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kemudian dapat disampaikan kepada DPR atau DPRD dan masyarakat. Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK akan memberikan hasil berupa opini. Terdapat lima jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa BPK, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP PP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini yang diharapkan oleh setiap instansi untuk menunjukkan bahwa pengungkapan yang telah dilakukan oleh pemerintah benar-benar baik dan dapat dipercaya. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat diperoleh dengan memenuhi beberapa kriteria seperti, kesesuaian pelaporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, adanya pengungkapan yang memadai, terpenuhinya kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (Effendy, 2013). Terpenuhinya keempat kriteria tersebut, maka transparansi dan akuntabilitas pengungkapan laporan keuangan pemerintah juga dapat terpenuhi. Adanya transparansi dalam penyediaan informasi laporan keuangan dapat memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dan pengguna laporan keuangan lainnya.

Beberapa hal lain seperti organisasi perangkat daerah dan umur pemerintah daerah juga dapat menjadi faktor



yang mempengaruhi laporan keuangan. Jika ada anggaran untuk sebuah proyek pembangunan daerah untuk jangka panjang. Tentu akan mempengaruhi evaluasi setiap tahunnya. Semakin panjang umur pemerintahan daerah maka hal ini juga akan mempengaruhi evaluasi laporan keuangan pemerintah daerah. Demikian juga organisasi perangkat daerah yang selalu berganti secara periodic karena kebijakan masa jabatan aparatur sipil Negara (ASN). Kebijakan tersebut dapat menimbulkan perbedaan kinerja organisasi perangkat daerah.

Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan disusun berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) dengan menyatakan bahwa entitas pelapor mengungkapkan informasi tentang ketaatan terhadap anggaran, dalam paragraf-paragraf selanjutnya menjelaskan tentang pentingnya pengungkapan semua informasi keuangan yang dibutuhkan bagi pengguna. Hal tersebut untuk menghindari adanya kekeliruan maupun kesalahpahaman dalam membaca laporan.

Berdasarkan dari data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat 34 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi pada tahun 2017 telah mengalami peningkatan kualitas jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016. Peningkatan kualitas LKPD Provinsi akan disajikan dalam tabel 1. berikutini:

Tabel 1.
Opini LKPD Provinsi Di Indonesia Tahun 2017 – 2019.

Tahun	Opini BPK					Total
	WTP	WTP PP	WDP	TW	TMP	
2017	25	2	6	0	1	34
	74%	6%	18%	0%	3%	
2018	29	0	5	0	0	34
	85%	0%	15%	0%	0%	
2019	31	0	3	0	0	34
	91%	0%	9%	0%	0%	

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan terkait dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah masih menunjukkan bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang selalufluktuatif. Pengungkapan dengan tingkat rata-rata tertinggi ditunjukkan pada penelitian (Setyowati, 2016) dengan rata-rata sebesar 64%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan dari laporan keuangan pemerintah provinsi yang masih terbilang rendah, sehingga peneliti memiliki keinginan untuk menganalisis lebih lanjut tentang faktor-faktor penentu yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Berdasarkan teori *stewardship* maka pemerintah selaku *steward* yang memiliki banyak informasi dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan rakyat selaku *principal* harus memiliki kesadaran untuk terus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Beberapa variable yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah, kekayaan daerah, jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), umur pemerintah, dan temuan audit.

Jumlah Organisasi Perangkat Daerah menggambarkan jumlah urusanyang menjadi prioritas suatu pemerintah daerah untuk membangun daerah. Semakin besar urusan suatu daerah maka semakin besar pula tingkat pengungkapan yang harus dilakukan. Begitu pula dengan umur pemerintah yang dapat diartikan sebagai seberapa lama pemerintahan tersebut berlangsung. Semakin lama umur pemerintahan akan mempengaruhi kualitas dari pengungkapan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan pengalaman pada pemerintahan tersebut. Audit merupakan pemeriksaan laporan keuangan secara menyeluruh yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Adanya temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan membuat pemerintah mendapatkan permintaan untuk melakukan koreksi dan peningkatan pengungkapan, maka semakin besar temuan audit maka semakin besar pula tambahan pengungkapan yang akan diminta oleh BPK dalam laporan keuangan. Hal tersebut terjadi karena semakin besar jumlah temuan audit oleh BPK, maka menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah memiliki kondisi yang buruk. Penelitian ini akan mencoba untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan-pernyataan diatas.

Dengan adanya pernyataan di atas, penulis akan melakukan pertimbangan dengan melihat dari penelitian-

penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengungkapan laporan keuangan pada pemerintah provinsi. Dengan demikian, penulis bermaksud untuk melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia dengan judul “Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia”.

Landasan Teori

Stewardship Theory dalam Pemerintahan

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan tentang situasi dimana para penerima amanah tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu seperti materi dan uang, melainkan lebih ditujukan pada sasaran utama untuk kepentingan organisasi. Berdasarkan asumsi filosofis, teori *stewardship* merupakan suatu teori yang dibangun berdasarkan sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain (Said, 2015). Teori ini juga menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, di mana kesuksesan organisasi dapat tercapai dengan memaksimalkan utilitas *principals* dan manajemen.

Hubungan yang dijelaskan dalam teori *stewardship* adalah hubungan antara *principal* dan *steward*. Dasar dari teori ini adalah psikologi dan sosiologi, di mana para penerima amanah (*steward*) termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan pihak pemberi amanah (*principal*). Perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* berusaha untuk dapat mencapai sasaran organisasi tersebut (Khasanah, 2014).

Dalam hubungannya dengan pemerintahan, pemerintah berlaku sebagai pihak yang diberikan amanah dan memiliki banyak informasi serta bertanggungjawab atas kepercayaan yang telah diberikan rakyat dan harus memiliki kesadaran untuk terus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus berusaha secara maksimal dalam menjalankan pemerintahannya untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tercapainya tujuan tersebut dapat memberikan kepuasan atas kinerja pemerintahan yang baik terhadap rakyat yang telah memberikan amanah pada saat pemilu.

Pengungkapan Informasi dalam Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan laporan keuangan disajikan dengan tujuan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan aktivitas yang telah dilakukan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai penggunaan sumberdaya ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kasus pelaporan.

Pengungkapan harus dapat memberikan informasi yang material dan relevan agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan yang baik juga harus disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan berlaku sebagai pedoman. Pengungkapan harus dapat menambah nilai informasi dan bukan mengurangnya dengan adanya keterangan yang terlalu rinci dan sulit untuk dianalisis. Pengungkapan (*disclosure*) laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas dari suatu unit usaha, untuk dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. Tiga konsep pengungkapan yang umum diusulkan adalah pengungkapan yang cukup, wajar, dan lengkap (Ghozali&Chariri, 2007). Pengungkapan yang paling umum untuk digunakan dari ketiga konsep ini adalah pengungkapan yang cukup. Pengungkapan dengan kriteria cukup dapat mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan.

Pengelompokan pengungkapan dalam laporan keuangan terdapat dua bagian, yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Pengungkapan ini merupakan pengungkapan lengkap yang menyajikan informasi-informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan tambahan yang tidak diwajibkan oleh standar akuntansi dan dianggap relevan dan berguna bagi pemakai laporan keuangan.

Ukuran Pemerintah

Terdapat beberapa variabel yang dapat menggambarkan ukuran suatu entitas. Variabel tersebut adalah total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar (Khasanah, 2014). Semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu daerah maka semakin besar pula ukuran pemerintah daerah tersebut. Semakin banyak penjualan, maka semakin banyak modal yang akan ditanam, dan semakin besar kapitalisasi pasar, maka semakin besar entitas tersebut dapat dikenal masyarakat. Ketiga variabel tersebut dapat digunakan dalam mengukur besarnya ukuran karena kemampuan ketiga variabel tersebut dalam mewakili seberapa besar entitas tersebut.

Variabel yang dapat digunakan untuk menggambarkan ukuran pemerintahan adalah total aset. Total aset dipilih karena memiliki nilai yang lebih stabil jika dibandingkan dengan penjualan dan kapitalisasi pasar. Pemerintah dengan ukuran atau total aset yang lebih besar akan cenderung lebih kompleks dalam mengelola dan menjaga asetnya. Konsekuensinya, pemerintah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang aset yang dimiliki dan menaruh perhatian lebih tinggi terhadap pengungkapan wajib sesuai dengan standar akuntansi.

Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah menggambarkan tingkat kemakmuran suatu daerah. Kekayaan daerah diporsikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sebagai salah satu penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah tersebut (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal tersebut berarti bahwa pendapatan asli daerah berasal dari kontribusi masyarakat di setiap daerah masing-masing.

Pendapatan asli daerah yang besar akan dapat memicu partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah selalu dilakukan untuk memicu pemerintah daerah agar mampu membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga tidak tergantung pada pemerintah pusat yang pada akhirnya daerah dapat mandiri.

Jumlah Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah daerah merupakan salah satu entitas pelaporan, yaitu unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi yang dimaksud adalah Organisasi perangkat daerah. Organisasi Perangkat Daerah juga merupakan perangkat daerah pada pemerintahan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Jumlah Organisasi Perangkat Daerah menggambarkan jumlah urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam membangun daerah. Semakin banyak urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah, maka semakin kompleks pemerintahan dalam melakukan tugasnya (Hilmi, 2012). Tugas pemerintahan yang semakin kompleks akan mendorong pemerintah untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar. Hal tersebut terjadi karena semakin besarnya tekanan dari rakyat selaku pemberi amanah terhadap pemerintah untuk melakukan pengungkapan yang bersesuaian dengan tugas pemerintahan yang semakin kompleks sebagai bukti dari pertanggungjawaban.

Umur Pemerintah Provinsi

Umur suatu organisasi dapat dilihat dari seberapa lama organisasi tersebut berlangsung sejak didirikannya. Umur administratif pemerintah adalah tahun dibentuknya suatu pemerintah daerah berdasarkan undang-undang pembentukan daerah tersebut (Setyaningrum & Syafitri, 2012).

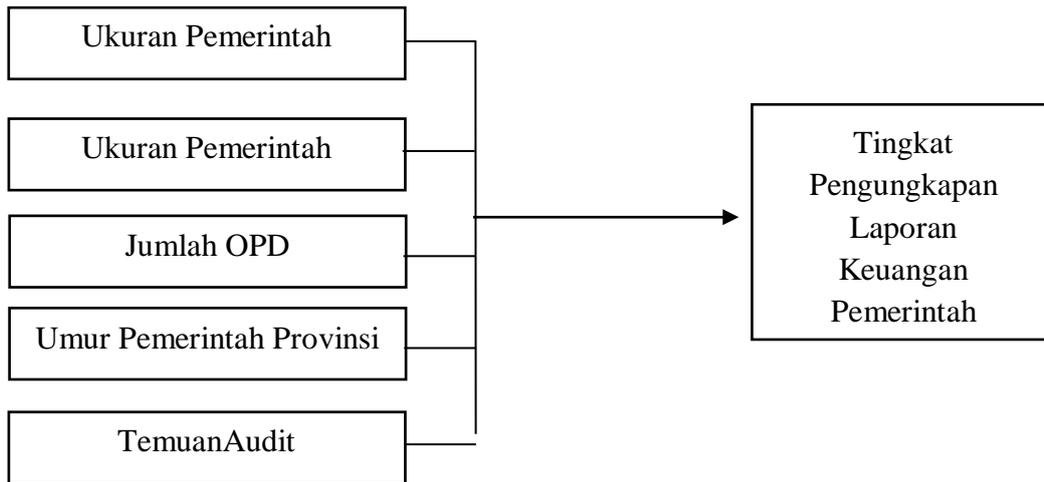
Umur pemerintahan akan memiliki korelasi dengan kelengkapan laporan tahunan. Pemerintah daerah yang memiliki umur yang lebih lama akan lebih tinggi pada tingkat pengungkapan laporan keuangannya, karena semakin tua umur suatu daerah akan memiliki pengalaman yang lebih baik dalam penyusunan laporan keuangan.

Temuan Audit

Audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan-pernyataan ekonomi untuk menetapkan tingkat kesesuaian pernyataan dengan kriteria yang ditetapkan dan

menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan (Khasanah, 2014). Audit negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan diaudit untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Hasil dari pemeriksaan audit dapat berupa opini, temuan, kesimpulan, atau dalam bentuk rekomendasi.

Temuan audit oleh BPK merupakan kasus-kasus di dalam laporan keuangan pemerintah yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya temuan audit oleh BPK akan mempengaruhi besarnya pengungkapan sebagai koreksi. Semakin besar jumlah temuan audit, maka semakin besar jumlah tambahan pengungkapan yang akan diminta oleh BPK dalam laporan keuangan. Hal tersebut terjadi karena semakin besar jumlah temuan audit oleh BPK, maka menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah memiliki kondisi yangburuk.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Metode Penelitian

Untuk menguji penelitian ini adalah dengan metode kuantitatif yaitu semua data dikumpulkan dan kemudian dihitung dan dianalisa, yang kemudian dituliskan dalam bentuk analisis dan laporan secara kuantitatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi, atau yang sering disebut dengan data sekunder. Data yang akan diambil pada penelitian ini adalah data dari laporan keuangan pemerintah daerah provinsi periode anggaran tahun 2017-2019. Penelitian ini menggunakan populasi berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia dengan tahun anggaran 2017 hingga tahun 2019 yang berjumlah 106 laporan keuangan. LKPD yang digunakan merupakan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah provinsi pada tahun anggaran 2017-2019, karena didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang digunakan dapat menyajikan informasi yang *up to date* sehingga bisa memberikan gambaran mengenai kondisi pemerintah provinsi terkini. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti sehingga sampel hanya representatif untuk populasi yang diteliti (Arifin, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan. Hasil uji normalitas pada Penelitian ini disajikan pada tabel 2. di bawah ini.

Tabel 2.
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
	n	82
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,000000

	Std. Deviation	0,04130855
Most Extreme Differences	Absolute	0,071
	Positive	0,067
	Negative	-0,071
	Kolmogorov-Smirnov Z	0,630
	Asymp. Sig. (2-tailed)	0,823

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data

Sumber : Output SPSS Versi 22 diolah 2021

Dari tabel 2. Uji normalitas diketahui bahwa nilai pada *Asymp Sig (2-tailed)* adalah 0,823, yang berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai sig. Berdasarkan hasil tersebut maka data yang diolah dapat dikatakan berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa uji normalitas telah terpenuhi dan data yang digunakan layak untuk diolah.

Tabel 3.

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 SIZE (Ukuran Pemerintah)	0,139	7.217
WEALTH (Kekayaan Daerah)	0,207	4.827
OPD (Jumlah OPD)	0,236	4.237
AGE (Umur Pemerintah Provinsi)	0,447	2.239
FIND (Temuan Audit)	0,946	1.057

Sumber : Output SPSS Versi 22 diolah 2021

Hasil dari uji multikolinearitas pada tabel 3. tersebut menyatakan bahwa semua variabel independen pada penelitian ini memiliki nilai *VIF* < 10, nilai *VIF* dari setiap variabel independen pada penelitian ini apabila dilihat dari tabel 4.4 adalah sebagai berikut; nilai *VIF* untuk ukuran pemerintah adalah 7,217, untuk kekayaan daerah adalah 4,827, untuk jumlah Organisasi Perangkat Daerah sebesar 4,237, untuk umur pemerintah provinsi sebesar 2,239, dan untuk temuan audit adalah sebesar 1,057. Hasil uji multikolinearitas juga menyatakan bahwa setiap variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,10, nilai tersebut adalah sebagai berikut; nilai *tolerance* pada variabel ukuran pemerintah sebesar 0,139, pada variabel kekayaan daerah sebesar 0,207, pada jumlah Organisasi Perangkat Daerah adalah 0,236, pada umur pemerintah provinsi adalah 0,447, dan pada temuan audit adalah sebesar 0,946. Berdasarkan nilai *VIF* dan *tolerance* dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak mengandung multikolinearitas.

Tabel 4.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients
-------	-----------------------------	---------------------------

		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	0,149	0,149		1,003	0,319
	SIZE (Ukuran Pemerintah)	-0,006	0,007	-0,268	-0,917	0,362
	WEALTH (Kekayaan Daerah)	0,003	0,005	0,171	0,715	0,477
	OPD (Jumlah OPD)	-0,0000369	0,000	-0,191	-0,852	0,397
	AGE (Umur Pemerintah Provinsi)	0,000	0,000	-0,299	-1,837	0,070
	FIND (Temuan Audit)	0,001	0,001	0,084	0,754	0,454

Sumber : Output SPSS Versi 22 diolah 2021.

Pada tabel 4. Menunjukkan bahwa hasil dari uji heteroskedastisitas memiliki variabel dengan nilai sig > 0,05, yaitu ukuran pemerintah dengan nilai sig sebesar 0,362, untuk kekayaan daerah sebesar 0,477, untuk jumlah Organisasi Perangkat Daerah adalah sebesar 0,397, untuk umur pemerintah provinsi sebesar 0,070, dan untuk temuan audit memiliki nilai sig sebesar 0,454. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

Tabel 5.
Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	t-statistik	Sig. t
(constant)	0,053	0,258	0,169	0,866
SIZE (Ukuran Pemerintah)	0,000	0,012	0,037	0,970
WEALTH (Kekayaan Daerah)	0,018	0,008	2,212	0,030
OPD (Jumlah OPD)	0,0000253	0,000	0,337	0,737
AGE (Umur Pemerintah Provinsi)	0,000	0,000	1,105	0,273
FIND (Temuan Audit)	0,001	0,001	0,686	0,495
R ² = 0,352				
Adj. R ² = 0,307				
n = 82				
Signifikan pada tingkat signifikansi α 5% atau 0,05				

Sumber: Output SPSS Versi 22 diolah 2021

Secara matematis hasil dari analisis regresi berganda pada tabel 5. dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = 0,053 + 0,000 \text{ SIZE} + 0,018 \text{ WEALTH} + 0,000 \text{ OPD} + 0,000 \text{ AGE} + 0,001 \text{ FIND}$$

Dari persamaan diatas menunjukkan pengaruh variabel independen (SIZE, WEALTH, OPD, AGE, dan FIND) terhadap variabel dependen (Y atau tingkat pengungkapan LKPD Provinsi). Arti dari koefisien regresi tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 0,053 menyatakan bahwa, apabila variabel bebas atau independen bernilai nol, maka nilai pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia adalah sebesar 0,053.
2. Koefisien SIZE sebesar 0,000 menunjukkan bahwa setiap terdapat penambahan 1 nilai pada SIZE, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,000.
3. Koefisien WEALTH sebesar 0,018 menunjukkan bahwa setiap terdapat penambahan 1 nilai pada WAELTH, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,018.
4. Koefisien OPD sebesar 0,000 menunjukkan bahwa setiap terdapat penambahan 1 nilai pada OPD, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,000.
5. Koefisien AGE sebesar 0,000 menunjukkan bahwa setiap terdapat penambahan 1 nilai pada AGE, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,000.
6. **Koefisien FIND sebesar 0,001 menunjukkan bahwa setiap terdapat penambahan 1 nilai pada FIND, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,001.**

Tabel 6.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,593 ^a	0,352	0,307	0,04272

- a. Predictors: (Constant), FIND (Temuan Audit), SIZE (Ukuran Pemerintah), AGE (Umur Pemerintah Provinsi), OPD (Jumlah OPD), WEALTH (Kekayaan Daerah).

Sumber : Output dengan SPSS Versi 22 diolah 2021

Hasil yang didapatkan pada uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*) berdasarkan tabel 6. Adalah sebesar 0,307 atau 30,7%. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia dapat dijelaskan sebesar 30,7% oleh variabel-variabel independen yang digunakan didalam penelitian ini. Variabel independen tersebut adalah ukuran pemerintahan (SIZE), kekayaan daerah (WEALTH), jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), umur pemerintah provinsi (AGE), dan temuan audit (FIND). Sedangkan sisanya sebesar 69,3% (100%-30,7%) lainnya dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan didalam penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa rata-rata tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia pada periode 2017-2019 adalah sebesar 58,35%, dengan tingkat pengungkapan terendah adalah Provinsi Kalimantan Utara pada periode 2017 sebesar 43% dan tingkat pengungkapan tertinggi adalah Provinsi Jawa Timur pada periode 2017 sebesar 69%.
2. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas dibuktikan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Besaran ukuran pemerintah yang digambarkan dengan nilai total asset yang dimiliki oleh setiap pemerintah tidak dapat mempengaruhi besarnya tingkat pengungkapan laporan keuangan pada setiap pemerintah provinsi.
3. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas dibuktikan bahwa kekayaan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Besaran kekayaan daerah yang digambarkan dengan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki oleh setiap pemerintah dapat memiliki pengaruh terhadap besarnya tingkat pengungkapan laporan keuangan pada setiap pemerintah provinsi.
4. Berdasarkan hasil dari pengolahan data di atas dibuktikan bahwa jumlah OPD tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Besaran jumlah OPD yang dimiliki oleh setiap pemerintah tidak dapat mempengaruhi besarnya tingkat pengungkapan laporan keuangan pada setiap pemerintah provinsi, dikarenakan setiap OPD akan memiliki kegiatan yang sama.

5. Berdasarkan hasil dari pengolahan data dibuktikan bahwa umur pemerintah provinsi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Besaran umur pemerintah provinsi yang dinilai berdasarkan undang-undang pembentukan pemerintahan yang dimiliki oleh setiap pemerintah tidak dapat mempengaruhi besarnya tingkat pengungkapan laporan keuangan pada setiap pemerintah provinsi.
6. Berdasarkan hasil dari pengolahan data dibuktikan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Besaran temuan audit yang ditemukan oleh BPK tidak dapat mempengaruhi besarnya tingkat pengungkapan laporan keuangan pada setiap pemerintah provinsi.

REFERENSI

- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Gani, I., & Amalia, S. (2015). *Alat Analisis Data; Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi & Sosial*. (M. Bendatu, Ed.). Yogyakarta: CV. Andi.
- Said, A. L. (2015). *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance*. (Sarmadan, Ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- Arifin, J. (2017). *SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.